

DAFTAR PUSTAKA

- Ariansyah, M., Amir, A. dan Achmad, E. 2014. "Tingkat Ketergantungan Fiskal dan Hubungannya dengan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Jambi". *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, Vol. 1, No. 3, Januari-Maret.
- Basri, H., Junaidi, dan Syaparuddin. 2013. "Pemetaan Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi" (versi elektronik). *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, Vol. 1, No. 2, Oktober.
- Busrizalti. 2013. *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*. Total Media. Yogyakarta.
- Fattah, S., dan Irman. 2012. "Analisis Ketergantungan Fiskal Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan Pada Era Otonomi Daerah Periode 2001 – 2008" (versi elektronik). *Journal Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum*. Volume 1. Nomor 2. Sulawesi Selatan.
- Halim, A. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, A. dan Muhammad Iqbal. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen.
- Halim, A., dan Mujib, I. 2009. *Problem dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah: Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah*. Sekolah Pascasarjana UGM. Yogyakarta.
- Kuncoro, M. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Erlangga, Jakarta.
- Ladjin, N. 2008. "Analisis Kemandirian Fiskal di Era Otonomi Daerah Studi Kasus Provinsi Sulawesi Tengah". *Tesis tidak dipublikasikan*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik*. Edisi Kedua, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mianti, R. 2014. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Bengkulu Sepuluh Tahun Terakhir". *Skripsi tidak dipublikasikan*, Universitas Bengkulu, Bengkulu.
- Munir, Dasril, Tangkilisan. (2004) *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta, YPAPI.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Republik Indonesia, Jakarta.
- Ritonga, I.T. 2014. *Analisis Laporan Keuangan Pemda*. Yogyakarta. Lembaga Kajian Manajemen Pemerintahan Daerah. Pustaka Pelajar.

- Ritonga, I.T., Colin, C., dan Guneratne, W. 2012. “Assessing Financial Condition of Local Government in Indonesia: An Exploration”. *Public and Municipal Finance*, Vol. 1, Issue 2, pp. 37 – 50.
- Rosnia. 2015. Analisis Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Dana Perimbangan: Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Pulau Sulawesi, 2006–2013”. *Tesis tidak dipublikasikan*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Setiaji, W., dan Adi, P.H. 2007. Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah: Apakah Mengalami Pergeseran? (Studi Pada Kabupaten/Kota se Jawa – Bali. *Simposium Nasional Akuntansi X*, Universitas Hasanudin 26 – 28 Juli “versi online”.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Republik Indonesia, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Republik Indonesia, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Jakarta.
- Zulkarnain. 2014. “Analisis Keuangan Daerah Kabupaten Kubu Raya Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya”. *Tesis tidak dipublikasikan*, Magister Ilmu Ekonomi Universitas Tanjungpura, Pontianak.